



## BAB IX

### PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

#### IX.1 Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui dampak dari pembangunan daerah yang telah dilaksanakan. Tujuan dalam penetapan Indikator Kinerja Daerah adalah memberikan gambaran tentang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Oleh karena itu, Indikator Kinerja Daerah juga dapat dikatakan sebagai Indikator Kinerja Utama bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih karena dapat menunjukkan kondisi yang diharapkan tercapai pada akhir periode RPJMD.

Keberhasilan pencapaian visi dan misi tersebut dapat diukur dari pencapaian kinerja pada aspek kesejahteraan, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Keberhasilan kinerja pada aspek tersebut ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* dari sasaran pembangunan daerah atau ditunjukkan dari pencapaian indikator yang bersifat mandiri setingkat *impact* yang diukur setiap tahunnya.

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang melingkupi kebutuhan dasar masyarakat/warga Kota Surabaya terkait pembangunan manusia, ketertiban dan ketentraman, pemerataan pendapatan, dan kesempatan kerja. Aspek pelayanan umum mengukur kinerja Pemerintah Kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah antara lain pengarusutamaan gender, kualitas lingkungan hidup dan persampahan, perumahan dan kawasan permukiman, pemerataan pembangunan infrastruktur, dan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik. Sedangkan aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan daerah dalam mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (*sustainable growth*) didukung oleh pertumbuhan volume komoditi keluar masuk Kota Surabaya, serta masyarakat yang menerapkan budaya lokal dalam sendi-sendi kehidupan. Indikator kinerja daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicators*) berdasarkan uraian tersebut di atas sebagai alat ukur menilai kinerja organisasi, maka indikator kinerja daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:



1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah
  2. Menggunakan indikator pencapaian program pembangunan yang diharapkan
  3. Memfokuskan pada hal-hal utama, kearifan lokal yang penting dan sinergi dengan pembangunan antar jenjang pemerintahan
  4. Terkait dengan penanggung jawab pelaksanaan pembangunan daerah.
- Secara rinci, dapat dilihat pada Tabel IX.1.



**Tabel IX.1**  
**Penetapan Indikator Kinerja Daerah**  
**Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kota Surabaya**

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD s.d 2015	Target Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
<b>A.</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>								
1.	IPM (Indeks Pembangunan Manusia)	79,47	79-80	79-80	79-80	80-81	80-81	80-81	80-81
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,01%	6,87%	6,73%	6,59%	6,47%	6,34%	6,22%	6,22%
3.	Indeks Ketertiban dan Ketentraman Kota	0,87	0,90	0,93	0,96	0,99	1,01	1,04	1,04
4.	Indeks Gini	0,39	0,38-0,37	0,38-0,37	0,38-0,37	0,38-0,37	0,38-0,37	0,38-0,37	0,38-0,37
<b>B.</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>								
1.	IPG (Indeks Pembangunan Gender)	93,65	93,66	93,67	93,67	93,68	93,69	93,70	93,70
2.	IKLHS (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Persampahan)	59,18	60,25	61,10	63,30	64,90	65,00	65,10	65,10
3.	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh	0,86%	0,78%	0,74%	0,46%	0,28%	0,22%	0,00%	0,00%
4.	Nilai SAKIP	B	B	B	B	B	A	A	A
5.	Rata-rata Nilai Kepuasan Masyarakat	72,89	73,00	74,00	75,00	76,00	77,00	78,00	78,00
6.	Indeks Ketimpangan Wilayah	0,83	0,82-0,83	0,82-0,83	0,82-0,83	0,81-0,82	0,81-0,82	0,81-0,82	0,81-0,82
<b>C.</b>	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>								
1.	Indeks Budaya Lokal	N/A	69,45	72,71	76,10	79,61	83,27	87,07	87,07
2.	Pertumbuhan PDRB/LPE	5,97%	5,8-6,2%	5,9-6,3%	6-6,5%	6,1-6,6%	6,2-6,8%	6,3-6,9%	6,3-6,9%
3.	Tingkat pertumbuhan volume komoditi keluar-masuk Kota Surabaya	N/A	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%



## **IX.2 Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah alat ukur kuantitatif untuk mengetahui hasil dari pelaksanaan sasaran pembangunan daerah oleh Kepala Perangkat Daerah (PD). Tujuan dalam penetapan IKU Kepala PD adalah memberikan gambaran tentang keberhasilan pencapaian target indikator sasaran daerah (*outcome*). Pencapaian indikator sasaran tersebut merupakan akumulasi dari pencapaian beberapa target indikator program. Secara rinci, IKU Kepala PD dapat dilihat pada Tabel IX.2.



**Tabel IX.2**  
**Indikator Kinerja Utama Kepala Perangkat Daerah Kota Surabaya**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	TARGET						Perangkat Daerah Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	99,02%	61,34%	64,56%	65,93%	67,37%	68,89%	70,50%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
2	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI	105,24%	96,16%	99,13%	99,30%	99,54%	99,85%	100,00%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs	105,03%	88,25%	90,98%	91,13%	91,35%	91,64%	91,99%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/MA/SMK	105,08%	87,04%	89,74%	89,88%	90,10%	90,38%	90,73%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
5	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	95,02%	92,67%	95,54%	95,69%	95,93%	96,23%	96,59%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs	95,03%	81,07%	83,58%	83,72%	83,92%	84,18%	84,50%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/MA/SMK	92,55%	81,35%	83,86%	84,00%	84,20%	84,47%	84,79%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
8	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,00%	1,08%	1,00%	0,93%	0,86%	0,79%	0,73%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	TARGET						Perangkat Daerah Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
9	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,00%	1,08%	1,00%	0,93%	0,86%	0,79%	0,73%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
10	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA	0,004%	1,04%	1,00%	0,93%	0,87%	0,80%	0,75%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
11	Angka Putus Sekolah (APS) SMK	0,007%	1,04%	1,00%	0,93%	0,87%	0,80%	0,74%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
12	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
13	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100,00%	98,90%	99,00%	99,10%	99,15%	99,20%	99,25%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
14	Angka Kelulusan (AL) SMA/MA	99,97%	97,80%	98,00%	98,20%	98,30%	98,40%	98,50%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
15	Angka Kelulusan (AL) SMK	99,97%	97,80%	98,00%	98,20%	98,30%	98,40%	98,50%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
16	Angka Melanjutkan (AM) SD/MI ke jenjang SMP/MTs	99,54%	99,00%	99,10%	99,20%	99,30%	99,40%	99,50%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
17	Angka Melanjutkan (AM) SMP/MTs ke jenjang SMA/MA/SMK	100,04%	97,80%	98,00%	98,20%	98,30%	98,40%	98,50%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	TARGET						Perangkat Daerah Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
18	Persentase lembaga pendidikan TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK yang terakreditasi	21,45%	21,66%	23,90%	26,14%	28,38%	30,62%	32,86%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
19	Persentase lembaga pendidikan non formal yang terakreditasi	8,11%	9,49%	15,22%	20,95%	26,88%	33,00%	39,33%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
20	Persentase penduduk miskin yang terlayani di layanan kesehatan	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
21	Indeks kepuasan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin	N/A	70	70	70	70	70	70	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
22	Cakupan pelayanan ibu nifas	93,80%	93,80%	94,04%	94,28%	94,52%	94,76%	95,00%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
23	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH (kelahiran hidup)	≤ 87,35 per 100.000 KH	≤ 85,72 per 100,000 KH	≤ 84,07 per 100,000 KH	≤ 82,40 per 100,000 KH	≤ 80,67 per 100,000 KH	≤ 78,30 per 100,000 KH	≤ 75,93 per 100,000 KH	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
24	Cakupan pelayanan kesehatan bayi	93,69%	93,69%	94,15%	94,62%	95,08%	95,54%	96,00%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
25	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH (kelahiran hidup)	≤ 6,48 per 1.000 KH	≤ 6,46 per 1.000 KH	≤ 6,45 per 1.000 KH	≤ 6,43 per 1.000 KH	≤ 6,41 per 1.000 KH	≤ 6,34 per 1.000 KH	≤ 6,26 per 1.000 KH	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
26	Persentase balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	TARGET						Perangkat Daerah Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
27	Persentase puskesmas yang terakreditasi	4,76%	23,81%	39,68%	55,56%	71,43%	85,71%	100,00%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
28	Persentase Rumah sakit yang terakreditasi	50%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
29	Indeks Kepuasan Layanan RSUD Bhakti Dharma Husada	N/A	76	77	78	79	80	81	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
30	Indeks Kepuasan Layanan RSUD dr. M. Soewandie	N/A	74	75	75	75	75	75	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
31	Persentase kelurahan siaga aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
32	Cakupan kelurahan mengalami KLB yang ditangani <20 jam	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan
33	<i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	1,81	1,8-1,9	1,8-1,9	1,8-1,9	1,8-1,9	1,8-1,9	1,8-1,9	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB
34	Tingkat kualitas konsumsi dan keamanan pangan	88,50%	87,50%	88,50%	89,30%	90,30%	91,00%	92,00%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan





NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	TARGET						Perangkat Daerah Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
35	Tingkat Stabilitas Harga komoditas pangan	91,30%	91%	92%	92%	93%	94%	95%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
36	Angka Pemuda Kader Anti Kenakalan Remaja per 10.000 pemuda	4,58	6,11	12,22	18,32	24,43	30,54	36,65	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
37	Persentase atlet yang memiliki prestasi di tingkat Regional, Nasional dan internasional	59%	65%	65%	65%	65%	65%	65%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
38	Persentase pencari kerja terserap pada pasar kerja formal	68%	> 40%	> 40%	> 40%	> 40%	> 40%	> 40%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
39	Persentase wirausaha muda yang berdaya	5%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga
40	Persentase jumlah kasus hubungan industrial	2,90%	2,80%	2,60%	2,50%	2,40%	2,20%	2,10%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja
41	Persentase PMKS yang ditangani yang berhasil direhabilitasi	12,44	11%	12%	13%	14%	15%	16%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Sosial



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	TARGET						Perangkat Daerah Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
42	Persentase PMKS usia produktif yang omzetnya $\geq$ 1 juta rupiah per bulan	43,23%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan KB
43	Persentase kecamatan yang responsif gender	19,35%	35,48%	48,39%	61,29%	74,19%	87,10%	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
44	Persentase Kelurahan Ramah Anak	3,25%	19,48%	35,71%	51,95%	68,18%	84,42%	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
45	Angka Pelanggaran Perda per 1.000 penduduk	18,71	18,34	17,97	17,61	17,26	16,91	16,57	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
46	Angka Kejadian Anarkis per 100.000 penduduk	1,09	1,05	1,02	0,99	0,95	0,92	0,88	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	TARGET						Perangkat Daerah Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
47	Persentase rencana Induk sektoral dan rencana rinci yang disusun dan telah tersinkronisasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	0%	6,90%	13,79%	20,69%	27,59%	34,48%	41,38%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
48	Persentase lokasi lahan yang tersedia bagi pembangunan untuk kepentingan umum	52,17%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
49	Persentase aset tanah dan/atau bangunan yang terintegrasi dalam sistem pengamanan dan pengelolaan aset	N/A	0%	8,55%	25,22%	41,88%	58,55%	75,22%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan
50	Persentase selisih luasan RTH yang dibangun dan dipelihara	0% (321,40 Ha)	1,86%	3,73%	5,60%	7,47%	9,33%	11,20%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
51	Persentase selisih timbulan sampah ke TPA	N/A	13,80%	15,60%	17,20%	18,90%	20,40%	21,90%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
52	Indeks Kualitas Udara Ambien	83,85	84	84,25	84,5	84,75	85	85,25	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	TARGET						Perangkat Daerah Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
53	Indeks Kualitas Air Permukaan	51,46	51,48	51,88	52,28	52,68	53,08	53,48	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
54	Indeks Penanggulangan Bencana	N/A	55,67%	61,88%	68,13%	74,33%	80,58%	84,69%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
55	Kawasan permukiman yang telah ditingkatkan kualitas lingkungannya	3039,33 Ha	3569,98 Ha	5124,52 Ha	6717,51 Ha	8295,64 Ha	9853,57 Ha	11437,03 Ha	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
56	Persentase upaya penerapan teknologi untuk pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	N/A	59,18%	67,35%	75,51%	83,67%	91,84%	100,00%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
57	Persentase peran serta masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan energi alternatif	N/A	28,57%	42,86%	57,14%	71,43%	85,71%	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup
58	Persentase selisih kegiatan dan/atau usaha yang telah menerapkan konservasi energi	N/A	0,00%	8,85%	17,70%	26,55%	35,40%	44,25%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	TARGET						Perangkat Daerah Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
59	Persentase Budaya yang dapat dilestarikan	88,72%	91,19%	91,39%	91,39%	91,39%	91,59%	91,59%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
60	Persentase koleksi buku yang dimanfaatkan	71,70%	73,10%	74,60%	76,10%	77,60%	79,20%	80,70%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
61	Persentase pengunjung layanan baca yang meminjam buku	62,10%	65,20%	68,50%	71,90%	75,50%	79,30%	83,20%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
62	Persentase siswa yang mempunyai kemampuan membaca sesuai dengan <i>reading text leveling</i>	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan
63	Persentase pertumbuhan partisipasi lembaga/komunitas dalam kegiatan yang mendorong nilai-nilai kebangsaan	4% (107 lembaga/komunitas)	4%	4%	4%	4%	4%	4%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan
									Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan
64	Persentase realisasi tindak lanjut MOU bidang Perdagangan ( <i>G to G dan G to B</i> )	N/A	N/A	28,57%	42,86%	57,14%	71,43%	85,71%	Sekretariat Daerah



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	TARGET						Perangkat Daerah Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
65	Tingkat pertumbuhan ekonomi kategori transportasi dan perhubungan	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	5,59%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
									Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
									Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
66	Angka Pelanggaran Disiplin Aparatur per 1.000 pegawai	1,48	1,43	1,37	1,32	1,26	1,21	1,15	Inspektorat
67	Persentase pelanggaran tata kelola administrasi keuangan pada kasus yang sama yang berhasil diturunkan	197 temuan	3,0%	6,1%	9,1%	11,7%	14,2%	16,8%	Inspektorat
68	Persentase aparatur (struktural & non struktural) yang kompeten	48,64%	53,98%	61,83%	69,69%	77,55%	85,41%	93,28%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan
69	Persentase Prosedur Operasi Standar (POS) yang diimplementasikan dengan baik	N/A	N/A	10%	20%	30%	40%	50%	Sekretariat Daerah
70	Tingkat Kepuasan Pelayanan Kedinasan	N/A	75%	76%	77%	78%	79%	80%	Sekretariat Daerah



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	TARGET						Perangkat Daerah Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
71	Persentase kecamatan dan kelurahan yang tertib administrasi	99,03%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
72	Persentase kegiatan DPRD yang terfasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat DPRD
73	Indeks kepuasan SKPD terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	N/A	60%	62%	64%	66%	68%	70%	Sekretariat Daerah
74	Persentase kerjasama non perdagangan yang ditindaklanjuti	100%	66,67%	73,68%	80,00%	85,00%	90,00%	100%	Sekretariat Daerah
75	Tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan program	88,33%	90,55%	90,84%	91,53%	91,96%	92,56%	93,05%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Perencanaan
76	Persentase kegiatan yang penyerapan anggarannya $\geq$ 76%	74,35%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	Sekretariat Daerah
77	Persentase produk hukum daerah yang dihasilkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Sekretariat Daerah
78	Nilai Kepuasan Masyarakat unit pelayanan administrasi kependudukan & pencatatan sipil	68,91	69	70	71	72	73	74	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
79	Tingkat persepsi masyarakat atas pelaksanaan pembangunan kota	N/A	70%	70%	75%	75%	80%	80%	Sekretariat Daerah



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	TARGET						Perangkat Daerah Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
80	Nilai Kepuasan Masyarakat unit pelayanan perizinan dan non perizinan	72,89%	76%	76%	76%	76%	76%	76%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
81	Tingkat kepuasan terhadap penyelenggaraan TIK dalam pelayanan publik administratif	N/A	N/A	Cukup	Cukup	Cukup	Baik	Baik	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika
82	Persentase kontribusi pajak terhadap PAD	67,87%	73,39%	75,69%	75,04%	75,54%	79,52%	80,06%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Penunjang Urusan Pemerintahan Unsur Keuangan
83	Persentase kontribusi bagi hasil BUMD terhadap PAD	3,35%	3,34%	4,02%	4,03%	4,03%	3,60%	3,60%	Sekretariat Daerah
84	Tingkat pertumbuhan produktivitas usaha mikro sektor produksi barang dan jasa	Rp 36,9 juta	11,00%	15,00%	19,00%	23,00%	27,00%	31,00%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
85	Tingkat pertumbuhan produktivitas koperasi	Rp 1604,5 milyar	5,00%	11,00%	17,00%	23,00%	29,00%	35,00%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
86	Tingkat Produktivitas budidaya pertanian	3,16 ton/ha	3,73 ton/ha	3,76 ton/ha	3,80 ton/ha	3,84 ton/ha	3,88 ton/ha	3,92 ton/ha	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian





NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	TARGET						Perangkat Daerah Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
87	Tingkat Produktivitas sektor perikanan tangkap dan budidaya	3,18 ton/orang	3,20 ton/orang	3,39 ton/orang	3,42 ton/orang	3,45 ton/orang	3,49 ton/orang	3,52 ton/orang	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan
88	Tingkat pertumbuhan pelaku usaha kreatif	400 pelaku usaha	0%	4%	5%	6%	7%	8%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
89	Tingkat pertumbuhan penerimaan sektor penunjang pariwisata	Rp 5525,8 milyar	7,96%	14,47%	21,59%	29,16%	37,21%	45,76%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata
90	Rata- rata pertumbuhan nilai realisasi investasi	-2,83%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
91	Indeks Genangan	48,33	43,99	43,11	42,25	41,41	40,58	39,77	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
92	Tingkat kehandalan jaringan jalan	N/A	0,4	0,4	0,41	0,41	0,42	0,42	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
93	Persentase Jalan Kewenangan Kota dengan V/C ratio $\leq 0.95$	N/A	30%	32%	34%	36%	38%	40%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	BASELINE (2015)	TARGET						Perangkat Daerah Pelaksana
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
94	<i>Load factor</i> kendaraan umum (Angkot)	26,80%	22%	23%	24%	26%	28%	30%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
95	<i>Load factor</i> kendaraan umum (Bis Kota)	N/A	34%	35%	36%	38%	40%	42%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan
96	Cakupan layanan teknis air bersih	92,66%	93,83%	95%	97%	100%	100%	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
97	Persentase panjang jalan yang sudah terpasang PJU dalam kondisi baik	5,17%	4,83%	7,37%	9,90%	12,44%	14,98%	17,51%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
98	Persentase pelaksanaan rekomendasi utilitas	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



### IX.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Hasil analisa terhadap program-program dalam Rancangan Awal RPJMD Kota Surabaya 2016-2021 merupakan rekomendasi berdasarkan hasil analisa isu-isu KLHS Kota Surabaya. Adapun 12 alternatif dan 11 rekomendasi KLHS yang ditindaklanjuti sebagai program RPJMD Kota Surabaya 2016-2021 sebagaimana dalam Tabel IX.3 sebagai berikut.

**Tabel IX.3**  
**Alternatif dan Tindak Lanjut Rekomendasi KLHS**

No	Alternatif dan Rekomendasi KLHS	Tindak Lanjut Rekomendasi KLHS	
		Arah Kebijakan	Program
<b>1</b>	<b>Alternatif</b>		
	a. Penambahan bahan literatur pengembangan wawasan lingkungan serta pemanfaatan sumberdaya berwawasan ekologi	Promosi hidup sehat di masyarakat, rumah sakit dan Puskesmas Penambahan koleksi buku di layanan baca	Program Upaya Kesehatan Masyarakat Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
	b. Pemberdayaan kurikulum pendidikan dengan titik berat penguatan akhlak	Bekerjasama dengan institusi pendidikan membangun nilai-nilai dan karakter kebangsaan bagi pelajar melalui kegiatan akademis maupun ekstrakurikuler Pembinaan peningkatan mutu pembelajaran di sekolah dengan penekanan pada penguatan akhlak	Program pengembangan wawasan dan karakter kebangsaan dalam konteks budaya lokal Program Penerapan Kurikulum
	c. Pengembangan sistem informasi untuk monitoring dan pembatasan akses terhadap informasi berbahaya	Pengendalian keamanan data dan informasi layanan (aplikasi, data, jaringan, perangkat keras)	Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
	d. Pemberdayaan pendidikan agama untuk peningkatan pemahaman moral dan etika. Pendidikan dengan titik berat penguatan akhlak	Pembinaan kader Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)/Bina Keluarga Remaja (BKR)/Bina Keluarga Lansia (BKL) Pembinaan peningkatan mutu pembelajaran di sekolah	Program Bina Keluarga Program Penerapan Kurikulum
	e. Khusus untuk kebutuhan air bersih, perlu adanya alternatif sumber air bukan konsumsi dengan sistem recycling	Penyediaan sarana jaringan air bersih	Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan



No	Alternatif dan Rekomendasi KLHS	Tindak Lanjut Rekomendasi KLHS	
		Arah Kebijakan	Program
	f. Pembatasan penduduk masuk dengan penetapan kebijakan persyaratan tinggal	Peningkatan intensitas pengawasan dalam menertibkan kota	Program Penegakan Peraturan Daerah
	g. Monitoring migrasi penduduk masuk, serta pengendalian penduduk illegal	Pengembangan database kependudukan secara terpadu serta pemutakhiran data secara berkesinambungan yang melibatkan seluruh instansi terkait di Pemerintah Kota	Program Penataan Administrasi Kependudukan
	h. Pengkhususan saprodi pada teknologi pertanian organik yang bisa dilakukan masyarakat	Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk pertanian	Program penyediaan Sarana Prasarana budidaya tanaman pangan dan hortikultura
	i. Pembatasan skala kegiatan peternakan di wilayah perkotaan (arahan kajian dan penataan ruang)	Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk koordinasi dalam pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota
		Penerapan sistem reward dan punishment dalam membangun kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi perizinan bangunan	
	j. Pendampingan UMKM untuk meningkatkan daya saing	Peningkatan kualitas SDM UMK dalam pengaplikasian teknologi tepat guna	Program standarisasi produk UMK
		Fasilitasi akses permodalan dan skema pembiayaan, termasuk Pengembangan kemitraan perusahaan besar dengan UMK	Program perkuatan permodalan UMK
		Pemanfaatan inovasi teknologi tepat guna dan informasi dalam meningkatkan produksi dan pemasaran produk UMK	Program perluasan jangkauan pemasaran UMK
	k. Membuka peluang koperasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan daya saing UMKM	Fasilitasi promosi unit bisnis koperasi	Program peningkatan kualitas usaha koperasi
		Sertifikasi pengelola usaha simpan pinjam	



No	Alternatif dan Rekomendasi KLHS	Tindak Lanjut Rekomendasi KLHS	
		Arah Kebijakan	Program
	i. Pemanfaatan metoda ekodrainase dalam perencanaan sistem drainase	Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase secara rutin dan berkelanjutan	Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota
<b>2</b>	<b>Rekomendasi</b>		
	a. Pengembangan teknologi pengelolaan limbah harus terintegrasi dengan program-program perbaikan kualitas lingkungan kota dan permukiman, sanitasi, dan atau kesehatan	Pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat Peningkatan sarana prasarana perumahan dan kawasan permukiman	Program perumahan permukiman
	b. Penanggulangan penurunan kualitas air dari kegiatan pertanian sebenarnya tidak signifikan karena luas ruang pertanian kecil, selain itu program ini harusnya sudah terintegrasi pada program peningkatan daya saing pertanian kota, serta konservasi sumber daya air di perkotaan, misalnya : program perbaikan sungai/normalisasi fungsinya	Peningkatan kualitas air permukaan untuk mendukung ketersediaan air baku	Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan
	c. Inovasi pemenuhan sumber air baru yang terintegrasi dengan program pembangunan sanitasi	Penyediaan sarana jaringan air bersih	Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan
		Peningkatan kualitas air permukaan untuk mendukung ketersediaan air baku	Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan
	d. Integrasi mitigasi ke dalam kebijakan beberapa sektor, terutama: a. pengelolaan persampahan dan limbah, b. transportasi, c. penyediaan air bersih	a.1. Peningkatan peran serta sekolah dan kantor swasta dalam pengendalian sampah	Program Pengelolaan Kebersihan
		a.2. Peningkatan pengelolaan sampah berbasis 3R di tingkat RT/RW dan Kelurahan secara berkala	
		a.3. Pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan sistem setempat	Program perumahan permukiman



No	Alternatif dan Rekomendasi KLHS	Tindak Lanjut Rekomendasi KLHS	
		Arah Kebijakan	Program
		a.4. Pemantauan pengendalian pencemaran limbah domestik di perumahan dan kawasan permukiman	Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan
		b. Peningkatan sistem manajemen angkutan umum massal yang aman, nyaman dan ramah	Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan
		c. Penyediaan sarana jaringan air bersih	Program Pembangunan Jaringan Air Bersih Perkotaan
	e. Penetapan kawasan industri, peningkatan kapasitas pengelolaan sampah, pengkajian pengembangan energi alternatif, penetapan titik titik terminal bahan baku di pinggiran kota perlu diintegrasikan dengan program pemberdayaan sumber daya manusia	a. Penetapan seluruh rencana rinci tata ruang kota secara bertahap	Program Perencanaan Ruang Kota
		b. Peningkatan pemanfaatan fasilitas pengelolaan sampah berteknologi tepat guna dan ramah lingkungan	Program Pengelolaan Kebersihan
		c. Optimalisasi penggunaan sumber energi alternatif terbarukan yang telah diterapkan pemerintah kota	Program Pengembangan dan Pemanfaatan energi alternatif
		d. Meningkatkan akses/sarana dan prasana pendukung menuju simpul kegiatan logistik dan distribusi dalam kota	Program Pengembangan Hub dan Simpul Logistik untuk Mendukung Distribusi Komoditas Potensial
	f. Penetapan kawasan industri, peningkatan kapasitas pengelolaan sampah, pengkajian pengembangan energi alternatif, penetapan titik titik terminal bahan baku di pinggiran kota diintegrasikan dengan program-program pengelolaan pemanfaatan ruang	Optimalisasi peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk koordinasi dalam pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota	Program Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang Kota
		Penerapan sistem reward dan punishment dalam membangun kesadaran masyarakat dalam tertib administrasi perizinan bangunan	
	g. Pengintegrasian teknologi pertanian perkotaan dengan program-program sanitasi dan peningkatan kualitas lingkungan	Pemantauan pengendalian pencemaran limbah domestik di perumahan dan kawasan permukiman	Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan



No	Alternatif dan Rekomendasi KLHS	Tindak Lanjut Rekomendasi KLHS	
		Arah Kebijakan	Program
	h. Pemantapan sistem transportasi regional sebagai bahan kajian kebijakan di tingkat provinsi	Peningkatan sistem manajemen angkutan umum massal yang aman, nyaman dan ramah	Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan
		Pembangunan dan pengembangan prasarana perpindahan moda transportasi yang aman, nyaman dan terintegrasi	
	i. Pemantapan konsep ekodrainase	Peningkatan kualitas air permukaan untuk mendukung ketersediaan air baku	Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan
		Pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana drainase secara rutin dan berkelanjutan	Program pengembangan dan pengelolaan sistem drainase kota
	j. Integrasi pengembangan transportasi dengan kegiatan bidang penelitian dan pengembangan daerah terutama untuk perhitungan daya dukung dan daya tampung, program pariwisata alternatif untuk meminimalisir pergerakan kendaraan bermotor	Peningkatan sistem manajemen angkutan umum massal yang aman, nyaman dan ramah	Program Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan
		Pembangunan dan pengembangan prasarana perpindahan moda transportasi yang aman, nyaman dan terintegrasi	
	k. Integrasi pemberdayaan kegiatan ekonomi lokal dengan sektor pariwisata dan pendidikan	Mendorong sektor-sektor usaha penunjang pariwisata (hotel dan restoran) untuk menampilkan kelompok-kelompok budaya lokal	Program pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal
		Peningkatan kualitas Obyek Daya Tarik Wisata	Program pengembangan destinasi wisata
		Menjalin kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata	Program pengembangan kerjasama dengan stakeholder bidang pariwisata